

Judul : Jemaah tak Perlu Keluar Biaya Tambahan
Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Jemaah tak Perlu Keluar Biaya Tambahan

Dari hasil kajian sementara, DPR dan Kemenag menurunkan BPIH menjadi Rp90,2 juta dari usulan awal sekitar Rp98 juta per jemaah.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan bahwa jemaah yang sudah lunas membayar tapi tertunda berangkat pada 2020, 2021, dan 2022 tidak perlu lagi mengeluarkan penambahan biaya untuk berangkat haji tahun ini.

"Saya usulkan di panja, dan alhamdulillah disetujui untuk yang lunas tunda tahun 2020 tidak ada lagi penambahan biaya. Yang 2021 termasuk tidak juga karena sudah ada yang lunas, tapi itu juga sedikit. Yang paling banyak 2020 karena pembatasan umur, karena cuma 50% kuota," kata Yandri sesuai rapat Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama soal penetapan biaya haji 2023 di Jakarta, kemarin.

Dia juga menjelaskan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bertujuan menjaga 'kesehatan' dana haji. Selain itu, mengingat kegiatan ibadah haji dapat dilaksanakan bila mampu.

"Jadi nilai BPIH, artinya yang ditanggung oleh jemaah karena menyangkut *istita'ah* (haji bila mampu) lebih sedikit dibandingkan nilai manfaat. Dalam rangka untuk menjaga kesehatan dana haji," pungkasnya.

Rapat pun berlangsung alot dan membuat penetapan biaya haji 2023 yang seharusnya diumumkan semalam tertunda menjadi hari ini.

Dari hasil kajian sementara, DPR dan Kemenag menurunkan BPIH menjadi Rp90,2 juta dari usulan awal sekitar Rp98 juta per jemaah. Angka Rp90,2 juta terbagi dalam komposisi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah

DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023

■ Keputusan finalisasi biaya haji 2023 diumumkan Rabu, 15 Februari 2023.

Hasil Sementara Rapat DPR-Kemenag (Selasa, 14 Februari 2023)

- Menyisir dan mengefisienkan beberapa komponen pembiayaan untuk di dalam dan luar negeri hingga level maksimal.
- Ada 2 komponen biaya haji yang masih belum disepakati:
 - Katering
 - Penginapan
- Kemenag bersama PT Garuda Indonesia sepakat menurunkan biaya penerbangan ibadah haji menjadi **Rp32,74 juta** dari semula **Rp33,4 juta**.
- Penurunan biaya yang ditetapkan tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jemaah.
- Diperkirakan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar **Rp90 juta**. Adapun biaya haji yang dibebankan kepada jemaah sekitar **Rp49 juta**.
- Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan biaya haji dengan para ahli.

sebesar Rp49,8 juta (55%) dan dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta (44,7%).

Sebagai perbandingan, di awal Kemenag mengusulkan rerata Bipih 1444 H/2023 Masehi sebesar Rp69 juta. Jumlah itu adalah 70% dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98 juta. Sebanyak 30% diambil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berusaha mencari berbagai komponen yang bisa dikoreksi sehingga menghasilkan angka Rp90,2 juta.

Namun, sejumlah anggota Komisi VIII masih belum menyetujui besaran angka tersebut karena menilai masih ada komponen yang bisa dirasionalisasi, yakni katering dan hotel.

"Saya setuju kita kasih kesempatan Kemenag untuk negosiasi kembali terkait aspirasi teman-teman," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi.

Harga tiket turun

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama

Garuda Indonesia Irfan Setiawati mengungkapkan pihaknya telah menurunkan dengan maksimal harga tiket pesawat yang akan dibebankan kepada jemaah haji 2023.

Ia memerinci, pada rapat panja terbaru, harga tiket pesawat dipatok Rp32.956.892 per jemaah. Kini, harga itu bisa diturunkan menjadi Rp32.743.992 per jemaah.

Menurut dia, harga yang diturunkan sudah maksimal dan tidak bisa ditawar lagi. Penyebabnya, karena harga avtur yang fluktuatif, komponen penerbangan saat ini sifatnya dolar berjalan sehingga Garuda Indonesia harus mematok harga asumsi kurs Rp15.150 dan estimasi harga sewa pesawat tahun ini yang sama dengan di 2019.

"Kata teman-teman Saudi sewa pesawat naik 30%, tapi kita tetap gunakan harga sewa pesawat 2019. Kita mengambil 2,5% margin. Ada risiko kalau kita menurunkan lagi harga sewa pesawat," ucap Irfan. (Pra*/Ant/X-11)



Sumber: DPR RI-Kemenag/Litbang MI